

# Diplomasi, Perdagangan, dan Kolonialisme: Relasi Siam–Hindia Belanda dalam Perspektif Sejarah

Akhdiat Dimas Abimanyu

Universitas Indonesia, [akhdiat.dimas@gmail.com](mailto:akhdiat.dimas@gmail.com)

## Info Artikel

*Article history:*

Received Sep, 2025

Revised Des, 2025

Accepted Des, 2025

*Kata Kunci:*

Hubungan Bilateral; Hubungan Diplomatik; Kolonialisme; Perdagangan

*Keywords:*

Bilateral Relationship; Colonialism; Commerce; Diplomatic Relations

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan bilateral yang bersejarah dan berkembang antara Siam, Thailand modern, dan Hindia Belanda, Indonesia modern, dari titik awal hubungan mereka hingga era pasca-revolusi nasional Indonesia. Diskusi ini mencakup sudut pandang diplomatik, ekonomi, dan budaya antara kedua negara, dengan fokus pada peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting, kerja sama perdagangan, dan dampak kolonialisme. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini juga membahas bagaimana hubungan tersebut bertransformasi dan diperkuat setelah Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan pada tahun 1949, menjadi Indonesia, setelah Konferensi Meja Bundar, dan bagaimana kedua negara menavigasi posisi dan peran mereka di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk arsip, buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya, untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan kedua negara.

## ABSTRACT

*This research analyses the historical and evolving bilateral relationship between Siam, the modern-day Thailand, and the Dutch East Indies, the modern-day Indonesia from their early touch point to Indonesia's post-national revolution era. The discussion's range over the diplomatic, economic, and cultural point of view between the two nations, focusing on important historical events, trade cooperations, and the impact of colonialism. With historical methods, this paper also discusses how the relationship transformed and strengthened after the Dutch East Indies gained independence in 1949, becoming Indonesia, following the Round Table Conference, and how both nations navigated their positions and roles in Southeast Asia. The paper utilizes primary and secondary sources, including archives, books, articles, and other scholarly works, to provide a comprehensive analysis of the relationship between the two nations.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Akhdiat Dimas Abimanyu, S.Hum.

Institution: Universitas Indonesia, Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: [akhdiat.dimas@gmail.com](mailto:akhdiat.dimas@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Hubungan bilateral merupakan sebuah aktifitas yang mengedepankan keuntungan antar dua negara, baik dari segi politik, ekonomi, budaya maupun kebaharuan. Walaupun merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi yang besar, Indonesia

tidak mungkin berkembang bila tidak ada kerja sama internasional. Pada era globalisasi dan semakin menipisnya batas-batas antar negara dengan mulai meluasnya implementasi free economic zone dan free movement zone, seperti area Schengen oleh Uni Eropa, kerja sama bilateral menjadi landasan krusial Indonesia dalam memperkuat posisinya di panggung internasional. Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah membangun hubungan bilateral dengan banyak negara. Hubungan bilateral antar negara merupakan sebuah bentuk kooperasi yang biasanya dilandaskan dengan adanya hubungan diplomasi antar dua negara yang menjadi subjek hukum internasional. Hubungan diplomasi melalui sebuah pengakuan atas kemerdekaan menandakan kesetaraan antar dua negara sehingga kerja sama lainnya bisa dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan bersama (Kadarudin et.al., 2019).

Sejarah hubungan bilateral Indonesia dengan dunia sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan lebih tua dari penggunaan nama Indonesia sendiri. Sejak masa nenek moyang kita menerima masuknya Hindu Budha dan membangun dinasti berlandaskan kepercayaan baru ini, Indonesia sudah membangun kerja sama dengan banyak negara-negara di Asia, seperti Cina, India, dan beberapa wilayah lainnya. Wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah paling pertama yang nenek moyang kita saling membangun relas antar bangsa. Salah satu wilayah yang membangun kerja sama paling awal dengan Indonesia adalah Siam atau yang saat ini dikenal dengan Thailand.

Hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia merupakan kisah panjang yang berkembang sejak abad ke-17 yang ditandai dengan interaksi perdagangan, diplomasi, dan pengaruh politik (Reid, 1993). Saat itu, Thailand masih dikenal dengan Siam dan Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda yang merupakan daerah koloni Kerajaan Belanda. Kedua negara ini, walaupun berada di bawah pengaruh kekuatan kolonial yang berbeda, tetap menjalin hubungan yang kompleks dan saling bersimbiosis mutualisme. Siam, sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menghindari kolonialisasi langsung oleh kekuatan Eropa, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Cina (Wyatt, 2003). Sementara itu, Hindia Belanda, sebagai koloni utama Belanda di Asia Tenggara, menjadi mitra dagang dan diplomatik yang penting bagi Siam (Andaya & Andaya, 2015).

Pada periode kolonial, hubungan Siam dengan Hindia Belanda didominasi pada kepentingan ekonomi dan politik regional. Belanda berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka di kawasan Asia Tenggara dengan menjalin kerja sama dengan Siam, baik dalam hal perdagangan maupun kebijakan strategis lainnya yang diharapkan mampu memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial (Tarlung, 1992). Di sisi lain, Siam melihat hubungan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan antara kekuatan kolonial Barat yang saat itu mencaplok dataran Indo-Cina, yang dalam hal ini, Prancis dan Inggris saling berbagi perbatasan yang dekat dengan Siam (Christian, 1941). Namun, hubungan antar dua negara ini mengalami perubahan signifikan setelah Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan dan menjadi Indonesia pada tahun 1945. Transformasi dari sebuah jajahan menjadi negara yang bebas dan berdaulat, membawa dampak besar terhadap interaksi antara kedua negara. Siam, yang kemudian menjadi Thailand, melakukan penyesuaian terhadap kebijakan luar negerinya untuk beradaptasi dengan realitas politik baru di kawasan Asia Tenggara (Vandenbosch, 1948). Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari hubungan kolonial menjadi hubungan antarnegara yang lebih setara, dengan berfokus pada kerja sama ekonomi, diplomasi, dan keamanan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah hubungan bilateral antara Siam dan Hindia Belanda, serta perkembangan hubungan bilateral antara dua negara setelah Indonesia merdeka. Dengan menganalisis faktor-faktor sejarah, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi hubungan kedua negara, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika hubungan tersebut membentuk lanskap geopolitik Asia Tenggara hingga saat ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Hubungan Internasional*

Hubungan internasional menjadi sangat penting karena negara-negara tidak bisa berdiri sendiri dan harus berinteraksi dengan dunia luar. Studi hubungan internasional sering dipahami sebagai kajian mengenai interaksi antar aktor yang melintasi batas negara. Holsti (1988) mendefinisikan hubungan internasional sebagai segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, yang mencakup lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, serta perkembangan norma etika internasional. Ia juga menambahkan bahwa kerjasama internasional secara sederhana dapat dilihat sebagai proses di mana negara-negara yang berhubungan bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi melalui pendekatan bersama. Kerjasama ini dapat terjadi dalam berbagai situasi dan konteks yang berbeda. Umumnya, bentuk kerjasama dan interaksi tersebut berlangsung langsung antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah bersama.

## 3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan metode sejarah yang disusun dengan mengikuti empat tahap dalam metode sejarah, yang meliputi heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), interpretasi, dan penulisan (historiografi) (Wardah, 2014). Sumber-sumber utama berupa arsip yang didapat dari institusi Arsip Nasional Republik Indonesia dan beberapa arsip sekunder yang didapatkan dari literatur. Selain itu, beberapa sumber literatur berupa buku dan artikel jurnal digunakan dan melalui kritik serta interpretasi yang mendalam guna mendapatkan pemahaman yang tersusun rapi dan kronologis. Selain itu, metode lain yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan informasi melalui kajian teori-teori dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat langkah dalam penelitian pustaka, yaitu mempersiapkan alat yang diperlukan, menyusun daftar referensi yang akan digunakan, mengatur durasi penelitian, serta membaca dan menulis materi penelitian. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan merekonstruksi data dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, serta penelitian-penelitian yang sudah ada (Ultavia et.al., 2023).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *4.1. Asia Tenggara dan Eropa: Kontak Pertama*

Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan umum dikenal dengan nama 'Further India', 'Little China' atau yang lebih umum lagi Indochina. Hal ini tak mengherankan karena wilayah Asia Tenggara yang diapit oleh dua kebudayaan besar, India dan Cina dan adanya perpaduan kedua kebudayaan itu dengan kebudayaan lokal yang sudah lebih dulu berkembang dan tidak langsung berasimilasi dengan masyarakat yang telah hadir dulu di wilayah ini. Sebaliknya, kawasan Asia Tenggara sejatinya telah berkembang sebagai sebuah peradaban tersendiri dan melakukan akulturasi dengan mengadopsi kebudayaan Cina dan India sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa itu (Danielson, 2009). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bentuk bangunan tempat peribadatan, seperti candi di Indonesia maupun di Kamboja seperti Angkor Wat yang berbeda dengan yang ada di India, serta dengan tetap berkembangnya kebudayaan asli Vietnam, terlepas dari bagaimana Vietnam menjadi salah satu negara dengan pengaruh kebudayaan Cina paling kuat di Asia Tenggara (Hall, 1981). Dari abad ke-1 sampai dengan abad ke-13, sejarah Asia Tenggara banyak dituliskan berdasarkan catatan-catatan dari birokrasi istana, catatan diplomatic, penjelajah dan jurnalis yang datang dan tinggal di Asia Tenggara. Selain itu, catatan lain menambahkan kekayaan khazanah sejarah Asia Tenggara melalui seni, etnografi, dan arkeologi (Sukkham et al., 2017).

Asia Tenggara adalah kawasan yang telah terintegrasi dengan kawasan lainnya melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Sebelum kekuatan besar Eropa hadir di Asia Tenggara, Asia Tenggara telah menjalin hubungan kerja sama dengan banyak kekuatan Asia, khususnya India dan Cina. Masuknya agama Hindu Budha di Asia Tenggara yang mengilhami berdirinya kerajaan-kerajaan awal di kawasan ini menjadi bukti konkret atas kehadiran pengaruh India di Asia Tenggara (Hall, 1981). Hubungan dengan Cina juga dibuktikan dengan adanya ekspedisi Zheng He yang berlangsung selama setidaknya tiga dekade (1405-1433) memberikan pengaruh besar terhadap masuknya pengaruh Cina di Malaka dan sekitarnya (Wade, 2005).

Memasuki era eksplorasi Eropa, Asia Tenggara menjadi salah satu tujuan dari ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Di abad ke-15, bangsa Eropa memulai ekspedisi sebrang lautan dengan semangat berlandaskan pada ekonomi, agama, dan politik (Ruangsilp, 2017). Bangsa Portugis menjadi inisiatör dan melakukan perjalanan ke belahan dunia timur hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka dan menjadikan sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Cina, India, dan Timur Tengah (Reid, 1993). Bangsa Spanyol mengikuti jejak dengan melakukan ekspedisi ke belahan bumi di Timur di bawah kepemimpinan Ferdinand Magellan dan sampai di Filipina di tahun 1521. Kolonialisasi Spanyol atas Filipina lalu dimulai di tahun 1565 di bawah kepemimpinan Miguel Lopez de Legazpi dengan berlandaskan semangat kristenisasi dan menjadikan Filipina sebagai penghubung antara Asia, Amerika, dan Eropa dari segi berdagangan (Zaide, 1994). Belanda dan Inggris menjadi dua bangsa Eropa yang mengikuti jejak Portugis dan Spanyol dimana Belanda berhasil mengambil alih kekuasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1641 dan memonopoli perdagangan di perairan terpenting di Asia Tenggara. Inggris juga membangun pusat kekuasaannya di Penang, Temasik (Singapura) dan Burma. Mereka melakukan kolonialisasi atas dasar ekonomi, yaitu melakukan monopoli atas perdagangan (Tarlind, 1992).

Sejak perairan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka dan Selat Sunda menjadi perairan yang sering dilalui oleh para pedagang dan pelayar dari berbagai belahan dunia, daratan Indocina menjadi sebuah wilayah yang tidak bisa diabaikan sebagai sebuah jalur perniagaan dunia. Pada masa itu, orang-orang Eropa meyakini bahwa satu-satunya cara untuk bisa mencapai Cina, khususnya Sungai Yangtze yang saat itu dipercaya mengalir hingga ke Teluk Bengal, adalah dengan melewati salah satu sungai yang ada di daratan Asia Tenggara yang diyakini berhulu di Sungai Yangtze. Ada dua sungai yang menjadi perhatian utama bangsa Eropa di dataran Asia Tenggara, yaitu sungai Mekong dan sungai Salween (Christian, 1941). Kedua sungai telah mempengaruhi bentuk perdagangan, agrikultur, dan politik di daratan Asia Tenggara.

Sungai Mekong, sebagai salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang 4.350 km, mengalir dari dataran tinggi Tibet dan melewati Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam sebelum berakhir di Laut Cina Selatan (Osborne, 2000). Sungai Mekong telah menyuburkan tanah-tanah yang dilaluinya dan menciptakan keamanan pangan. Sungai Mekong juga menjadi penyambung antara wilayah Isan (utara Thailand) dengan Laos, Kamboja, dan Vietnam (Evans, 2002). Sungai Mekong tidak hanya memiliki peran penting di bidang ekonomi, namun juga memiliki fungsi penting di bidang politik dan militer. Pada periode Ayutthaya, penguasaan atas Sungai Mekong menjadi sumbu konflik antara Siam dengan Laos dan Kamboja, khususnya saat Siam berkonflik dengan Laos di abad ke-18 hingga abad ke-19 (Bryant, 1997).

Sungai Salween juga berhulu ket Tibet dan memiliki perannya tersendiri dalam perkembangan peradaban Asia Tenggara. Namun, dikarenakan kondisi geografis disekitarnya jauh lebih sulit dibanding Sungai Mekong, perkembangannya jauh lebih lambat dan menyebabkan kehidupan tradisional di masa itu masih begitu kuat (Dore et al.,

2012). Kelompok etnis Karen, Shan, dan Mon merupakan beberapa kelompok etnis yang diuntungkan dengan terisolasi Sungai Salween dari sentuhan pengaruh luar. Ketiga komunitas ini sangat bergantung dari memancing di sungai, perdagangan antar desa, dan pertanian sehingga kearifan lokal mereka terjaga (Middleton, 2018). Dari sisi politik dan militer, Sungai Salween punya peran penting saat Inggris memegang kendali atas Burma dimana Sungai Salween menjadi perbatasan alami antara Siam (Thailand) dengan Burma (Myanmar) (Middleton & Lamb, 2019). Melihat pengaruh kedua sungai ini yang begitu besar, tidak mengherankan bila orang-orang Eropa menaruh perhatian tinggi terhadap daratan Asia Tenggara, tak terkecuali orang-orang Belanda yang saat itu sudah hadir di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Nilai jual tinggi daratan Asia Tenggara bagaikan berlian dan berpotensi memberikan keuntungan bila dimaksimalkan sepenuhnya melalui jalur diplomatik.

#### 4.2. Terciptanya Hubungan Bilateral Pertama

Belanda bukan menjadi kekuatan Eropa pertama yang membangun kerja sama dengan Siam (Thailand). Sebelum Belanda melakukan kerja sama dengan Siam, bangsa Eropa seperti Portugis telah lebih dulu hadir di Siam, tepatnya di Patani pada 1601. Pada masa itu, Patani adalah sebuah kerajaan vasal di bawah kekuasaan Ayutthaya. Walaupun merupakan sebuah negara vasal, Patani adalah wilayah yang maju dan Makmur karena posisinya yang strategis untuk menghubungkan Laut Andaman dengan Laut Cina Selatan. Berkat posisinya yang strategis, Patani mendapat julukan "Pintu untuk ke Cina dan Jepang" oleh para pedagang Eropa. Patani, yang saat itu dipimpin oleh seorang ratu menolak kehadiran Portugis dan lebih menerima kehadiran pedagang Cina dan Jepang dan langsung memberikan izin untuk menderikan pabrik dan fasilitas penunjang lainnya (Blankwaardt, 2020). Belanda baru menginjakkan kaki di Siam, tepatnya di Patanu pada tahun 1603.

Di abad ke-17, kehadiran Belanda di Asia Tenggara, khususnya di kepulauan Nusantara direpresentasikan oleh sebuah perusahaan dagang bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Walaupun merupakan sebuah perusahaan dagang, pada kenyataannya, VOC beroperasi seperti sebuah negara kecil yang dikenal dengan nama "Dewan Tujuh Belas" atau dikenal juga dengan Heeren Seventien, memiliki independensi dalam membangun hubungan diplomatik, dan juga angkatan bersenjata. Pada tahun 1604, representatif dari VOC mengunjungi Ayutthaya dengan maksud membangun kerja sama dagang dengan kerajaan tersebut serta memberi akses untuk Belanda mencapai Cina melalui Sungai Mekong dan Salween. Pertemuan pertama ini mendapatkan respon tidak mengenakan dari Ayutthaya karena dikhawatirkan akan menciptakan konflik antara dua kekuatan yang memiliki kekuatan untuk melakukan monopoli (Pombejra, 1990).

Keseriusan Ayutthaya dalam membangun citra sebagai kekuatan dan pengaruh di kawasan Asia Tenggara diwujudkan dengan didirikannya Phrakhlang Sinkha, yaitu sebuah kementerian yang mengatur hubungan dengan pihak luar dan perdagangan. Penolakan yang dilakukan oleh Ayutthaya terhadap VOC tidak semerta-merta memutus hubungan komunikasi antara dua entitas. Ayutthaya, melalui kementeriannya di atas, sering bertukar surat dengan VOC yang berkedudukan di Batavia. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas kedaulatan Ayutthaya di mata VOC dan begitu pula sebaliknya. Kedua entitas saling menyadari posisi mereka sebagai kekuatan dagang di Asia Tenggara sehingga menjaga hubungan baik diplomatik menjadi kunci. Bahkan, Gubernur Jenderal Warwijck mengakui kedaulatan dan pengaruh besar yang dimiliki oleh Ayutthaya.

Pada tahun 1608, Raja Naresuan mengirimkan utusan untuk mengunjungi Belanda sebagai bentuk keseriusannya dalam membangun kerja sama dengan Belanda. Sebelum mereka berlayar ke Belanda, mereka mengunjungi Bantam (saat ini Banten) di tahun 1607 untuk berlayar bersama dengan beberapa delegasi dari pihak VOC. Kunjungan ini menjadi titik pertemuan pertama antara Siam dengan Hindia Belanda. Keputusan mereka untuk

berlayar bersama dengan VOC sempat mendapatkan penolakan dari pihak VOC karena biaya perjalanan yang akan menjadi lebih besar. Namun, Gubernur Jenderal Warwijck tetap mengizinkan karena ketidak beraniannya untuk menolak utusan Raja Naresuan dari Ayutthaya. Sesaat setelah sampai di Belanda, utusan Ayutthaya dan VOC disambut oleh Pangeran Oranje Maurice dari Nassau dan beberapa pejabat publik dengan mengadakan upacara penjamuan (Van der Cruyse, 2002). Utusan Ayutthaya membawa beberapa hadiah untuk Republik Belanda seperti rempah-rempah, sutra, dan batu berlian. Hal ini mengindikasikan bahwa kunjungan utusan Ayutthaya ke Belanda tidak hanya dalam bentuk diplomatic, namun juga sebagai ajang pertukaran budaya. Sebagai balasan, Belanda menunjukkan beberapa alat tempur dan beberapa artefak kuno (Smith, 2018).

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan negosiasi untuk menjalin kerja sama dagang antara Republik Belanda dengan Siam Ayutthaya. VOC telah menunjukkan ketertarikannya dengan pelabuhan-pelabuhan di Siam dan sumber daya alamnya serta melihat potensi besar dari Teluk Siam karena menjadi penghubung antara Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman sehingga menjadi sebuah perairan yang sangat sibuk di abad ke-17 (Van der Cruyse, 2002). Wilayah Siam Selatan yang menjadi bagian dari Semenanjung Malaya juga menjadi tempat dimana pedagang-pedagang dari Arab, India, Sri Lanka, dan Cina bersinggah sebelum melanjutkan perjalanan mereka (Sukkham, 2017). Negosiasi ini lantas mendapatkan respon yang baik dan berakhir dengan ditanda tanganinya perjanjian pada 22 Desember 1608 yang memberikan keleluasaan untuk Belanda bergadang di Ayutthaya, termasuk membangun pelabuhan di wilayah Ayutthaya. Pelabuhan ini mulai beroperasi pada 1609 dan menjadi titik penting untuk proses jual beli barang, ide dan teknologi antara barat dan timur (Smith, 2018).

Pada tahun 1613, VOC secara resmi mendirikan kantor dagangnya di Ayutthaya dan membangun kantornya di dalam dinding kota Ayutthaya. Kantor dagang lainnya juga dibangun di Pattani, Sangora, dan Ligor. Pembangunan kantor-kantor ini menyusul diberikannya beberapa tanah oleh Raja Prasat Thong. Selain kantor dagang, VOC juga lantas membangun pabrik-pabrik, khususnya dalam memproses kayu-kayu yang menjadi salah satu komoditi penting di Selatan Siam.

#### **4.3. Perkembangan di Abad 17 hingga 18: Konflik Perdagangan, Konsensus, dan Kejatuhan Ayutthaya**

Hubungan bilateral antara Siam Ayutthaya dengan Belanda terus berlanjut dengan mementingkan keuntungan kedua belah pihak. Pada periode 1650-an sampai dengan 1660-an, Siam Ayutthaya sering melakukan pelayaran ke perairan utama Jawa, khususnya Banten dan Batavia untuk membeli beberapa komoditi, seperti kuda dan menukaranya dengan komoditi lain seperti kayu dan porselin. Siam Ayutthaya sebelumnya memang sudah diberikan kebebasan oleh VOC untuk melakukan pelayaran ke kepulauan Nusantara sebagai bentuk pengakuan kedaulatan Siam Ayutthaya dari VOC. Kunjungan ini juga menjadi wadah bagi para penguasa lokal Nusantara, seperti Sultan Banten dan Sultan Susuhunan dari Mataram untuk membangun diplomasi dengan Siam Ayutthaya dan membangun hubungan dagang. Siam Ayutthaya juga melakukan kontak dengan penguasa lokal di Jambi dan bahkan menaruh minatnya untuk menjadikan Jambi sebagai vasal Ayutthaya. Namun, VOC menekankan bahwa Jambi sudah menjadi negara vasal Mataram sehingga tidak mungkin menjadi vasal untuk Ayutthaya (Pombejra, 1992).

Walaupun hubungan bilateral ini terlihat harmonis, kenyataannya, catatan sejarah menunjukkan adanya pertentangan yang terjadi antara dua kekuatan besar Asia Tenggara ini. Pertentangan ini dimulai pada era Raja Narai yang memimpin dari tahun 1656 sampai dengan 1688. Pada saat Raja Narai memerintah Siam Ayutthaya, Raja Narai menunjukkan ketertarikannya dengan dunia luar dan memiliki rasa kaingintahuan yang besar terhadap budaya asing. Pada masa-masa kepemimpinannya, para pedagang dan pelancong dari Afrika Utara, Cina, dan Prancis diterima dengan baik oleh Siam Ayutthaya dan

mendapatkan perlakuan istimewa. Namun, kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut di Ayutthaya menjadi sebuah ancaman bagi Belanda yang mengkhawatirkan hak Istimewa yang sudah mereka dapatkan sejak hubungan diplomatik terbentuk di awal abad ke-17. Sebagai langkah konkret untuk mencegah kekuatan besar asing lainnya mendapatkan hak yang sama, Belanda yang direpresentasikan oleh VOC melakukan blokade atas Sungai Chao Phraya yang saat itu memegang peranan penting dalam menghubungkan area inti Siam Ayutthaya dengan Teluk Siam. Menyadari ancaman yang muncul di depan mata, Raja Narai melakukan negosiasi dengan VOC dan menyelesaikan konflik ini pada 22 Agustus 1664 dengan sebuah perjanjian yang memperjelas kekuatan Belanda dan hak istimewanya dalam mengatur perdagangan, khususnya di Ligor (sekarang Nakon Si Thammarat) dan Ujung Salang (sekarang Phuket). Selain itu, perjanjian ini juga memberikan tugas untuk kedua belah pihak atas kuota dari setiap barang yang didagangkan agar tidak terjadi kekurangan bahan pangan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2018).

Walaupun perjanjian ini menjadi sebuah konsensus kedua belah pihak, Belanda merasa tetap tidak memiliki sepenuhnya kontrol atas hak-hak yang sudah dijanjikan dalam perjanjian tersebut. Belanda merasa bahwa pihak Ayutthaya terlalu sering mengintervensi segala hal tentang perdagangan dan menyebabkan kurangnya jumlah produksi dan kuota yang sebelumnya sudah ditentukan dalam perjanjian. Namun, berkat kontrol besar terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Siam serta ketergantungan Siam Ayutthaya dengan VOC dalam mengontrol perairannya, VOC mampu menekan Siam Ayutthaya dalam mengontrol perdagangan yang melalui perairan tersebut sehingga Raja Narai dan VOC selalu berakhir dengan konsensus. Konflik lain yang muncul adalah ketidakpuasan Siam Ayutthaya atas komoditi-komoditi yang dijual kepada mereka oleh VOC yang ditengarai sebagai bentuk diskriminasi atas perbedaan budaya. Selain itu, VOC seakan semakin mengetatkan penjagaan atas monopoli perdagangannya di Asia Tenggara dengan melakukan monopoli atas komoditi timah yang banyak diproduksi di semenanjung Malaya, Phuket, dan Bangkli. Hal ini dilatar belakangi oleh tekanan atas persaingan keta-tantara Belanda dengan kekuatan Eropa lainnya, seperti Inggris dan Prancis (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2018). Konflik ini juga berakhir dengan konsensus dimana kedua belah pihak mengakui kontribusi dan kekuatan masing-masing (Pombejra, 1990).

Pada awal abad ke-18, krisis lain muncul dimana terjadi penurunan keuntungan akibat sulitnya jalur suplai atas barang-barang komoditas, terutama kayu, beras dan timah. Di sisi lain, Ayutthaya meyakini bahwa VOC yang melakukan kecurangan karena menjual barang-barang mereka dengan harga jauh di bawah pasar, menyebabkan penerimaan kas tidak membaik. Akibatnya, pada tahun 1705, pabrik-pabrik milik Belanda di Ayutthaya dan Ligor di tutup akibat kerugian yang dalam. Pemerintah Belanda di Den Haag meminta VOC untuk menarik diri dari Siam. Namun, pihak VOC merasa hal tersebut tidaklah mungkin karena VOC, khususnya Batavia sudah sangat bergantung pada beras yang dikirim dari Siam. Namun hal itu tidak bertahan lama. Pada akhirnya, Belanda menarik seluruh aktivitas produksi mereka dari Siam pada tahun 1741 dan memindahkan semuanya ke Batavia. Hubungan diplomatik ini tidak terputus sepenuhnya. VOC masih mengirimkan beberapa kapal ke Siam untuk mengangkut beberapa barang komoditas dagang, seperti gading gajah, kayu, dan timah. Pihak VOC sempat berkeinginan untuk membangun kerja sama kembali dengan Ayutthaya. Namun hal itu digagalkan atas serangan Burma ke Ayutthaya dan mengakhiri salah satu dinasti terkuat di dalam sejarah Siam pada tahun 1767 (Blankwaardt, 1959). Burma tidak hanya menghancurkan bangunan-bangunan penting, namun juga fasilitas dagang dan kantor dagang beberapa negara Eropa yang membuka kantornya di Ayutthaya juga dihancurkan. Akibatnya, Ayutthaya seakan ditinggalkan oleh bangsa Eropa dan terisolasi. Pada akhir 1700-an, VOC yang telah berjuang dari kerugian yang besar secara resmi dibubarkan akibat keuntungan dan pengaruhnya yang semakin menurun serta munculnya kekuatan dagang baru, yaitu

Temasik atau dikenal saat ini dengan Singapura sehingga Banten dan Batavia tidak lagi terlalu menarik. Pemerintah Belanda mengambil alih kepulauan Nusantara dan memegang kendali utama atas Hindia Belanda.

Setelah Ayutthaya runtuh akibat invasi yang dilakukan oleh Burma yang dipimpin oleh Raja Hsinbyushin, Siam tetap melakukan ekspedisi dan mengirim surat kepada negara-negara yang sudah menjadi mitra mereka, seperti Cina, Jepang, dan bahkan Belanda (Erika, 2007). Pada saat Siam kembali menguatkan dirinya dan berdiri kembali di bawah pemerintahan Raja Taksin, surat dikirimkan kepada pihak VOC untuk mengajak Belanda kembali membuka pabrik di Siam dengan menjelaskan bahwa dibawah Taksin, Siam telah kembali beroperasi sebagai sebuah negara yang berdaulat dan masih menjanjikan. Namun ini tidak berjalan mulus. Di dalam negeri, legitimasi raja Taksin menjadi bahan pertanyaan, sebab adanya dua pangeran yang menyelematkan diri ke Kamboja dan keinginan besar Taksin untuk mendapatkan pengakuan dari kaisar Cina. Raja Taksin lalu dieksekusi oleh Pangeran Theppiphit yang merupakan bagian dari dinasti sebelumnya. Pengaruh Cina begitu besar di dalam urusan kerajaan Siam dimana Cina menjadi mediator antara VOC dengan Siam, walau pusat pemerintahannya tidak lagi di kota Ayutthaya, namun di Thonburi. Negosiasi tidak menghasilkan kerja sama apapun dan hubungan diplomatic antara Siam dan Belanda pun runtuh (Pombejra, 1990).

#### **4.4. Perkembangan Hubungan Bilateral Siam dan Hindia Belanda di Abad 20**

Hubungan bilateral antara Siam dengan Hindia Belanda tidak muncul kembali sampai dengan pertengahan abad ke-19 akibat fokusnya Belanda dan kekuatan Eropa lainnya terhadap penyelesaian Perang Napoleon. Di awal abad ke-19, Siam menerapkan pendekatan politik luar negeri yang sangat hati-hati dan untuk tidak terlalu berpihak dengan salah satu dari banyaknya kekuatan Eropa di Asia Tenggara saat itu. Di awal abad ini, Inggris dan Prancis berada di tahap konflik yang berbeda, dimana Inggris menguasai Burma dan Prancis menguasai Vietnam. Siam yang berada di antaranya menyadari pentingnya politik ketidak berpihakkan di saat genting ini.

Pada tahun 1826, dibawah pemerintahan Raja Mongkut, Siam melakukan transformasi terhadap kebijakan luar negerinya. Sebelum Raja Mongkut bertahta, raja-raja Siam yang saat itu berada di bawah Dinasti Cakri menerapkan kebijakan luar negeri yang terbilang ketat dan terisolasi. Raja Mongkut menyadari bahwa Siam perlu memainkan peran penting agar tidak dikuasai oleh kekuatan barat sepenuhnya. Dibawah pemerintahannya, Siam menandatangani sebuah perjanjian bernama Perjanjian Burney dengan Inggris, dimana keberpihakan sangat jelas terlihat untuk menguntungkan Inggris dari segi perdagangan. Perjanjian lain juga ditandatangi pada tahun 1833 dengan Amerika Serikat dan Prancis pada tahun 1840 (Snidvongs, 2023). Pada tahun 1858, Siam dan Hindia Belanda menandatangani perjanjian di bidang persahabatan, perdagangan, dan navigasi yang memberikan hak yang sama kepada Belanda seperti yang diberikan kepada para pedagang dari Inggris dan Prancis (Anderson, 2016). Pada tahun 1860, Siam dan Belanda kembali menjalin hubungan diplomatik. Perjanjian ini lalu diratifikasi oleh dua belah pihak dimana Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan utusan khusus Raja Belanda hadir di Bangkok di tahun 1862 (Pombejra, 1990).

Transformasi terjadi bagaimana Belanda dan Siam menjalin hubungan bilateral mereka. Berbeda dengan dua abad sebelumnya, Belanda tidak menekankan kehadirannya di Siam dan tidak mengganggu kedaulatan Siam atas wilayahnya. Hal ini diyakini diakibatkan oleh menurunnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan Inggris serta Prancis memegang posisi penting di daratan Asia Tenggara sehingga Belanda hanya berfokus pada hubungan perdagangan (Smith, 2013). Hubungan perdagangan antara Siam dengan Belanda berfokus pada eksport impor produk agrikultur dan hutan, seperti beras dan kayu. Belanda menjadi salah satu importir terbesar beras dari Siam, sama halnya dengan kayu dan rempah-rempah. Sebagai bentuk timbal balik, Belanda mengekspor barang-

barang siap jadi, seperti tekstil (Jones, 2008). Selain itu, Raja Mongkut memberikan izin kepada pedagang Belanda untuk beroperasi di Bangkok dan membuat kebijakan luar negeri dan ekonomi Siam menjadi lebih terbuka untuk dunia luar, khususnya Belanda.

#### **4.5. Revolusi, Perang Dunia, dan Gerakan Kemerdekaan di Hindia Belanda**

Memasuki abad ke-20, Siam menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme bangsa Barat. Asia Tenggara menjadi tempat bagi bangsa Barat melakukan ekspansi besar atas wilayah jajahannya, seperti Kamboja yang akhirnya menjadi bagian dari Prancis dan Kedah yang menjadi bagian dari Inggris. Namun, abad ke-20 juga menjadi awal dimana kekuasaan sebagian bangsa Eropa, khususnya Portugis, mengalami penurunan akibat menguatnya kekuatan Eropa lain. Politik luar negeri Siam masih berfokus pada menjaga stabilitas wilayah yang mendapat pengakuan dari kekuatan Eropa di Asia Tenggara yang mengakui posisi penting Siam sebagai pembatas, khususnya bagi Inggris dan Prancis (Baker & Phongpaichit, 2014).

Abad ke-20 menjadi titik berubahnya hubungan bilateral antara Siam dengan Hindia Belanda. Hubungan bilateral yang sebelumnya begitu holistik mencakup ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan, kini hanya berupa hubungan dagang dengan kedua negara tidak saling menekankan intervensi terhadap urusan kenegaraan dan kedaulatannya masing-masing. Abad ke-20 juga menyaksikan bagaimana dunia menghadapi perang dunia pertama dan kedua. Pada Perang Dunia I (1914-1918), Siam mengambil langkah kontras dengan politik luar negerinya sejak membangun kembali negaranya dari kehancuran serangan Burma. Siam mendeklarasikan perang terhadap Blok Sentral dan beraliansi dengan Sekutu yang di dalamnya terdapat Belanda dan seluruh koloninya, termasuk Hindia Belanda (Vella, 1978). Berakhirnya Perang Dunia I dengan ditanda tanganinya Perjanjian Versailles pada tahun 1919, Siam mengambil langkah diplomatik untuk bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan besar Barat, tak terkecuali Belanda untuk memberikan ruang lebih bagi Siam dalam mengatur politik luar negerinya. Namun sayangnya, Belanda lebih berfokus pada menguatkan posisinya dan koloninya sehingga memperlemah hubungan bilateral dengan Siam (Wyatt, 2003).

Perubahan signifikan terjadi di tahun 1932 dengan adanya kudeta untuk mengubah Siam menjadi negara demokratis dan mengakhiri kekuasaan absolut monarki. Revolusi Siam 1932 disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat atas kemampuan monarki, khususnya Raja Prajadhipok dalam meyelesaikan permasalahan ekonomi dan penolakannya terhadap modernisasi politik. Masyarakat umum, militer, dan para pejabat sipil bersatu dengan nama Partai Rakyat (Khana Ratsadon) (Batson, 1984). Revolusi 1932 memberikan efek domino terhadap keadaan politik di Asia Tenggara. Belanda, sebagai penguasa atas Hindia Belanda, mengamati revolusi berlangsung dengan gugup. Revolusi dikhawatirkan akan memicu gerakan nasionalisme dan kekhawatirkan akan semakin meluasnya perlawanan daerah jajahan untuk merdeka dari jeratan kolonialisme (Stowe, 1991). Efek lain yang terjadi daripada Revolusi 1932 adalah perubahan nama Siam menjadi Thailand pada tahun 1939. Perubahan nama ini diinisiasi oleh Perdana Menteri Phibun dengan mengubah nama negara Siam yang dikenal secara lokal sebagai Prathet Siam menjadi Prathet Thai serta Thailand dalam penggunaan internasional (Juntanamalaga, 1988).

Asia Tenggara kembali memanas dengan pecahnya Perang Dunia II yang secara holistik mengubah tatanan kerja sama antara Siam, yang saat ini dikenal dengan Thailand dengan Hindia Belanda. Hindia Belanda, sebagai koloni Belanda, menjadi target ekspansi Kekaisaran Jepang dalam upaya mereka memperluas imperiumnya. Selain itu, kekayaan alam Hindia Belanda juga menjadi daya tarik bagi Jepang mengingat kebutuhan perang yang memerlukan persediaan sumber daya yang banyak. Tidak hanya Hindia Belanda yang diserang dan mengakibatkan terdepaknya Belanda dari Asia Tenggara untuk sementara waktu, Thailand juga menjadi sasaran Jepang akibat lokasinya yang strategis

dan penting dalam memainkan peran di daratan Asia Tenggara. Jepang lantas menginvasi Thailand pada Desember 1941 dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Phibun untuk tunduk kepada Jepang dan beraliansi dengan Jepang (Reynolds, 1994). Dalam proses beraliansi dengan Jepang, Thailand membantu Jepang dalam memperkuat posisinya di Asia Tenggara dengan menaklukkan Semenanjung Malaya dari Inggris dan wilayah Indocina Prancis. Akibatnya, Belanda melihat aksi Thailand sebagai penghianatan dan menjadikan hubungan antara Belanda dengan Thailand menjadi dingin (Tarling, 2001).

Pada tahun 1944, Perdana Menteri Phibun digulingkan dan pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Khuang Aphaiwong berusaha untuk menjauhkan diri dari kedekatan mereka dengan Jepang dan berusaha memperbaiki hubungan bilateral dengan Belanda. Namun, hal ini tidak menjadi fokus utama Belanda dikarenakan setelah perang dunia selesai, Hindia Belanda memutuskan untuk merdeka dan berubah nama menjadi Indonesia sehingga fokus Belanda beralih ke mempertahankan koloni mereka (Tarling, 2001). Sebagai pihak luar, Thailand berusaha semaksimal mungkin untuk tetap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Keputusan ini diambil dengan maksud untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda dan kekuatan baru Asia Tenggara, Indonesia yang dalam sejarahnya telah saling berkontak satu sama lain (Baker & Phongpaichit, 2014). Pasca Revolusi Nasional Indonesia berakhir dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949 dan disahkannya Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS), kekuasaan Belanda di Asia Tenggara secara resmi berakhir. Thailand dan Indonesia secara resmi menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia pada tahun 1947 dengan dibukanya kedutaan besar Indonesia di Bangkok (Kadarudin, et al., 2019).

## 5. KESIMPULAN

Hubungan bilateral antara Siam, yang sekarang dikenal dengan Thailand dan Hindia Belanda, yang kini dikenal dengan Indonesia telah berkembang sejak abad ke-17, ditandai oleh interaksi perdagangan dengan kekuatan Eropa, diplomasi, dan upaya memperkuat pengaruh politik kawasan. Meskipun berada di bawah pengaruh kekuatan kolonial yang berbeda, kedua wilayah tetap menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Pada periode kolonial, hubungan antara Siam dan Hindia Belanda lebih banyak berfokus pada kepentingan ekonomi dan politik mengingat kedua negara memiliki posisi penting dalam perpolitikan regional. Belanda berusaha memperkuat posisinya di Asia Tenggara dengan menjalin kerja sama dengan Siam, sementara Siam melihat hubungan tersebut sebagai peluang untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Cina serta membuka pintu ke kancah internasional. Perubahan besar terjadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah Hindia Belanda berakhir dan menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 mengikuti Konferensi Meja Bundar, hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand bertransformasi dari hubungan kolonial menjadi kerja sama antarnegara yang lebih setara. Thailand beradaptasi dengan realitas politik baru di Asia Tenggara dan hubungan keduanya berkembang ke arah kerja sama ekonomi, diplomatik, dan keamanan. Secara keseluruhan, hubungan antara kedua negara mengalami pasang surut seiring dengan perubahan geopolitik dan dinamika regional. Namun, hubungan ini tetap memiliki peran penting dalam membentuk stabilitas dan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (2015). *A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830*. Cambridge University Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, & The Corts Foundation. (2018). *The diplomatic correspondence between the Kingdom of Siam and the Castle of Batavia during the 17th and 18th centuries*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Baker, C., & Phongpaichit, P. (2014). *A History of Thailand*. Cambridge University Press.
- Batson, B. A. (1984). *The End of the Absolute Monarchy in Siam*. Oxford University Press.

- Blankwaardt, W. Notes on the Relations between Holland and Siam. Selected Articles from the Siam Society Journal, Bangkok, 1959.
- Bryant, R. (1997). The Political Ecology of Forestry in Burma: 1824–1994. University of Hawaii Press.
- Christian, John L. (1941). Anglo-French Rivalry in Southeast Asia: Its Historical Geography and Diplomatic Climate. *Geographical Review* 31.
- Danielson, Kristen. (2009). What is Southeast Asia. Northern Illinois University.
- Dhiravat na Pombejra. (1992). Court, Company, and Campong: Essays on the VOC Presence in Ayutthaya. Ayutthaya Historical Study Center.
- Dore, J., Lebel, L., & Xu, J. (2012). Democratizing Water Governance in the Mekong Region. Earthscan.
- Evans, G. (2002). A Short History of Laos: The Land in Between. Allen & Unwin.
- Erika, Masuda. (2007). The Fall of Ayutthaya and Siam's Disrupted Order of Tribute to China (1767–1782). *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies*.
- Hall, D. G. E. (1981). A history of South-East Asia (4th ed.). Macmillan.
- Jones, P. (2008). Economic Relations in 19th Century Southeast Asia. Oxford University Press.
- Juntanamalaga, Preecha. 2013. Thai or Siam?. *Journal of Onomastics* Volume 36. <https://doi.org/10.1179/nam.1988.36.1-2.69>.
- Kadarudin et.al. (2019) Mutual Benefit Principle as Bilateral Basis of Indonesia with Thailand and Taiwan. *International Journal of Global Community*, II (1).
- KJ Holsti 1988, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , JilidII, Terjemahan M. Tahir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Middleton, C. (2018). Salween River Development: An Overview of Political and Environmental Challenges. *Water Alternatives*, 11(3), 456–470.
- Middleton, C., & Lamb, V. (2019). The Salween Under Threat: Dams, Development, and Resistance. *Asian Studies Review*, 43(1), 23–45.
- Osborne, M. (2000). The Mekong: Turbulent Past, Uncertain Future. Allen & Unwin.
- Reynolds, E. B. (1994). Thailand and Japan's Southern Advance, 1940–1945. St. Martin's Press.
- Reid, A. (1993). Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Expansion and Crisis. Yale University Press.
- Ruangsilp, B., & Wibulsilp, P. (2017). Ayutthaya and the Indian Ocean in the 17th and 18th Centuries: International Trade, Cosmopolitan Politics, and Transnational Networks. *The Journal of the Siam Society*, 105, 97–114.
- Smith, J. (2018). The Dutch East India Company and the Globalization of the Seventeenth Century. Routledge.
- Smith, D. (2013). The VOC and Its Legacy: Dutch Influence in Asia. Harvard University Press.
- Snidvongs, N. (2023). Siam's foreign relations in the reign of King Mongkut, 1851-1868. International Studies Center.
- Sukkham, Atthasit, et al. (2017). Ships and Maritime Activities in the North-eastern Indian Ocean: re-analysis of rock art of Tham Phrayanaga (Viking Cave), southern Thailand. *The International Journal of Nautical Archaeology*. doi: 10.1111/1095-9270.12213.
- Tarling, N. (1992). The Cambridge History of Southeast Asia, Volume 2: The Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge University Press.
- Tarling, N. (2001). A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia, 1941–1945. C. Hurst & Co. Publishers.
- Ultavia, Anelda, et.al. (2023). Kualitatif: Memahmi Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11, 2. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Vandenbosch, A. (1948). The Dutch East Indies: Its Distance Future and Its Relation to Siam. University of California Press.
- Van der Cruysse, D. (2002). Siam and the West, 1500–1700. Silkworm Books.
- Vella, W. F. (1978). Chaiyo! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism. University of Hawaii Press.
- Wade, G. (2005). Southeast Asia in the Ming Shi-lu: A geography of diplomacy in the 15th century. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Wardah, Eva Syarifah. (2014). Metode Penelitian Sejarah. *Tsaqofah* Vol. 12 No.2. DOI: 10.32678/tsaqofah.v12i2.3512.
- Wyatt, D. K. (2003). Thailand: A Short History. Yale University Press.
- Zaide, G. (1994). Philippine history and government. National Book Store.